

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, nusantara mengalami banyak gejolak pada tahun akhir tahun 1949 terutama setelah perjanjian KMB yang meresmikan berdirinya KMB, dimana setelah perjanjian KMB, berdirilah R.I.S atau Republik Indonesia Serikat. RIS sendiri kemudian membagi nusantara menjadi beberapa Negara bagian diantaranya adalah RI yang berwilayah di sekitar karesidenan Yogyakarta dan beberapa distrik di Jakarta, NIT atau Negara Indonesia Timur yang berwilayah dari Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, kemudian masih ada Negara Negara lain seperti Negara Pasundan, Negara Sumatra Timur, dan Negara Borneo disamping terdapat masih ada banyak Negara bagian yang resmi menjadi Negara federal dibawah RIS. Sejarah penggabungan dari RIS menjadi NKRI pun menempuh banyak halangan dan rintangan, karena ketika itu terdapat dua golongan masyarakat, yaitu golongan kaum federalis dan kaum republikan. Golongan kaum federalis adalah golongan orang-orang yang pro dengan RIS, sedangkan golongan kaum republican adalah golongan yang menginginkan Negara-negara dibawah RIS melebur menjadi satu Negara yang berdaulat.

Proses penggabungan Negara-negara bagian RIS sendiri berawal dari Negara Bagian Pasundan yang mempelopori untuk membubarkan Negara bagiannya dan melebur ke dalam pemerintahan RIS. Secara resmi, Negara bagian yang pertama kali melebur kedalam RIS adalah Negara bagian Sumatra Selatan yang membubarkan Negara bagiannya dan secara resmi oleh pemerintah RIS dileburkan dengan Negara bagian RI yang berpusat di Yogyakarta pada 10 Februari 1950. Efek domino kemudian menjalar ke Negara bagian yang lain, peleburan negara diikuti oleh Negara bagian pasundan yang secara resmi melebur dibawah RIS pada 11 Maret 1950, setelah sebelumnya pada 7 maret 1950 RIS mengeluarkan undang-undang darurat pasal 130 tentang pembubaran Negara bagian untuk kemudian digabungkan dengan Negara bagian RI. Undang-undang tersebut disambut positif oleh banyak Negara bagian, dibuktikan dengan banyak Negara bagian yang mengajukan diri untuk bergabung dengan RI, sehingga pada akhir Maret 1950 hanya tersisa 4 negara bagian yang masih bertahan, yaitu RI, Kalimantan Barat, Negara Sumatra Timur (NST), dan Negara Indonesia Timur(NIT).

RIS hanya menjadi tiga Negara bagian setelah pada 22 April 1950 Kalimantan Barat menjadi bagian dari RI setelah melewati sidang Majelis Permusyawaratan. Sementara itu Negara bagian NST dan NIT masih bersikukuh untuk tidak menggabungkan diri karena adanya beberapa faktor internal dan eksternal. Negara Sumatra Timur bertahan hingga akhirnya dibentuk NKRI karena di wilayah tersebut terdapat banyak warga melayu dan china pro federal

yang terusik oleh para ekstrimis dari kaum republik karena rata-rata warga melayu dan china di wilayah itu dahulu kala mendapat perlakuan istimewa dari kaum colonial belanda. Ketika adanya kondisi tersebut kaum melayu dan china yang sebagian besar bangsawan berkeras untuk tidak bergabung dengan Negara bagian RI karena khawatir apa yang mereka miliki akan hilang. Dilain sisi, jumlah kaum bangsawan yang anti penggabungan dengan RI hanya sepertiga dari jumlah kaum yang menginginkan penggabungan, namun karena adanya adu domba dari belanda anti penggabungan yang turut menyusupi dan memecah belah kaum pro penggabungan sehingga kaum republican tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan kaum federalis.

Di bagian timur jauh, Negara Indonesia Timur yang merupakan basis dari Belanda semenjak pertama kali menginjakkan kaki di bumi nusantara ini. Sehingga sangat sulit untuk menggabungkan pandangan dari kaum republican dan kaum federalis yang ada di Negara Indonesia Timur. Diluar pengaruh kuat Belanda yang telah memonopoli kehidupan rakyat Indonesia bagian timur semenjak 3.5 abad yang lalu, para bekas-bekas tentara KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger)pun masih memiliki pengaruh yang kuat diatas tanah rakyat Indonesia timur karena Belanda memang sejak awal menjadikan Ambon dan Minahasa sebagai keanggotaan KNIL. Kondisi tersebut diperkuat dengan dukungan militer Australia terhadap Belanda sehingga membuat kekuatan pihak federalis semakin kuat di wilayah Negara Indonesia Timur. Dukungan terang-terangan pasukan Australia diketahui dari maklumat Panglima

Tentara Australia di Makassar Brigadir Jendral Chilton pada tanggal 29 Oktober 1945 yang isinya sanget menekan gerakan pemuda pendukung proklamasi kemerdekaan. Salah satu isi maklumat tersebut adalah melarang orang memakai seragam militer atau uniform lain, selain anggota pasukan sekutu atau polisi. Maklumat tersebut juga melarang penduduk untuk melakukan latihan militer, memakai atau mempunyai segala macam senjata api dan senjata tajam, mengadakan pawai atau pertunjukan, dan sebagainya. Hal yang sangat mencolok adalah larangan Jendral Chilton kepada Gubernur Sulawesi saat itu, Dr. G.S.S.J. Ratulangi untuk menjalankan tugasnya dengan dalih pemerintahan sipil telah dijalankan oleh NICA dengan tanggung jawab dan perlindungan tentara Australia yang bertindak sebagai kesatuan sekutu. Apabila Gubernur Sulawesi saat itu, Dr. G.S.S.J. Ratulangi melanggar kesepakatan maka akan diambil tindakan penahanan terhadapnya.

Dibawah pengaruh Belanda yang semakin kuat di wilayah Negara Indonesia Timur tersebut sebenarnya terjadi banyak pergolakan, terutama pergolakan antara kaum federalis yang tentunya didukung oleh pemerintah Belanda dan Sekutu dengan kaum republican yang menginginkan NIT melebur menjadi satu dengan RI. Dukungan dan kekuatan kaum republican sebenarnya tidak kalah banyaknya dengan kaum federalis, namun seringkali terjadi perpecahan didalam kubu republican sendiri yang menyebabkan kaum republican tidak bias cukup berkembang. Puncaknya terjadi pada awal tahun 1950 ketika konflik antara dua pendapat yang berbeda tersebut mulai timpang karena pihak

republican mendapat dukungan dari presiden RIS Ir. Sukarno dan Perdana Menteri Muh. Hatta. Hal tersebut membuat pemerintah Negara Indonesia Timur mengeluarkan kebijakan untuk menahan laju kuatnya pengaruh kaum republican, namun ternyata kebijakan tersebut sia-sia karena pengaruh republican semakin kuat, hal ini membuat Dr. Soumokil cs memutuskan memisahkan diri dari RIS dan mendirikan Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS dan menyatakan proklamasi kemerdekaan RMS pada 25 April 1950. Dikarenakan konflik yang mulai menjurus pada perpecahan yang lebih luas lagi, maka pada tanggal 3 hingga 5 Mei 1950 diadakan pertemuan antara Perdana Menteri RIS Muh. Hatta, Presiden NIT Sukawati, dan PM NST Dr. Mansyur. Dari pertemuan selama tiga hari tersebut didapatkan hasil bahwa akan segera dibentuknya sebuah Negara Kesatuan. Meskipun pada tanggal 13 Mei 1950 Dewan Sumatra Timur menentang, namun pada 19 Mei 1950 Negara Sumatra Timur akhirnya menyetujui untuk membentuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan syarat Negara Sumatra Timur tidak melebur dengan RI atau dengan kata lain, Negara Sumatra Timur (NST), Republik Indonesia(RI) dan Negara Indonesia Timur (NIT) tetap melebur menjadi satu dibawah bendera RIS yang kemudian diganti namanya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Kesatuan Republik Indonesia pada akhirnya diresmikan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 15 Agustus 1950.

Selang antara tahun 1949 hingga 1952 merupakan tahun-tahun yang krusial bagi bangsa Indonesia karena banyak terjadi pergolakan dan

pemberontakan bahkan tidak sedikit gerakan-gerakan separatis yang muncul dan memperkeruh suasana yang memang sudah kacau. Salah satu dari banyak gerakan separatis yang ada saat itu dan masih bertahan hingga saat ini adalah Gerakan Republik Maluku Selatan yang diproklamirkan oleh mantan Jaksa Agung dan Wakil Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Dr. CRS Soumokil pada 25 April 1950. Sejarah pun mencatat banyak peristiwa yang melibatkan NKRI dengan Gerakan RMS yang disebut oleh pemerintah NKRI sebagai gerakan separatis, namun di satu sisi lain RMS beranggapan bahwa mereka memiliki hak untuk merdeka dan telah memenuhi syarat sebagai Negara yang merdeka. Titik awal sejarah perlawanan RMS adalah ketika gerakan tersebut diberantas oleh pasukan TNI yang dikirim dari Jawa untuk memberantas gerakan-gerakan separatis yang muncul. Merasa bahwa RMS telah memproklamasikan diri dan telah merdeka, maka ketika wilayah yang seharusnya menjadi teritori mereka direbut oleh TNI yang mengatasmakan untuk persatuan NKRI tentunya mereka berang. RMS menganggap bahwa mereka telah merdeka sebelum NKRI dibentuk, karena RMS telah memproklamirkan kemerdekaannya pada 25 April 1950, ketika RMS masih termasuk anggota NIT (NIT, NST, dan RI melebur menjadi NKRI pada 15 Agustus 1950). RMS masih berdiri hingga sekarang bahkan selalu melakukan pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali karena pada waktu itu, ketika anggota RMS terdesak oleh TNI, RMS dijanjikan kemerdekaan oleh Belanda sehingga banyak anggota RMS yang “mengungsi” ke Belanda.

Di Negeri Kincir angin tersebut ternyata Belanda hanya memberikan angin surga, janji yang diberkian ternyata tidak di buktikan, bahkan para “pengungsi” dari Maluku tersebut hidup tersiksa dan menderita di tanah Belanda. Dengan direbutnya Maluku yang diklaim oleh RMS sebagai wilayah negaranya dan terseret oleh janji palsu pemerintah Belanda, maka semakin panas lah beban sejarah yang diderita oleh para anggota RMS. Dendam sejarah yang hingga kini masih tersisa dan bahkan telah beberapa kali menciderai hubungan diplomatic NKRI – Belanda.

Dalam sejarah Hubungan NKRI-Belanda sendiri sebenarnya tidak selalu berjalan mulus, proklamasi RI pun sebenarnya hingga kini tidak diakui oleh pemerintah Belanda, hingga kini Belanda mengakui kemerdekaan RI pada 27 Desember 1949. Hal ini yang sebenarnya akan disahkan pengakuannya pada kunjungan presiden yang tiba-tiba dibatalkan tersebut, namun karena batalnya kunjungan maka pengesahan tersebut kembali terbengkalai. Namun tidak selalu buruk hubungan yang terjadi antara NKRI dengan Belanda, apalagi yang ada kaitannya dengan RMS, hubungan NKRI-Belanda hampir selalu lancar bahkan bias dikatakan sangat baik. Memang dalam awal mula hubungan NKRI-Belanda panas karena Belanda ketika awal tahun 1950-an menampung para tokoh, pendukung, dan pengikut RMS di Belanda, dan hal ini membuat presiden NKRI saat itu, Ir. Sukarno sangat berang terhadap Belanda. Seiring berjalannya waktu, hubungan NKRI-Belanda membaik karena NKRI menjadi salah satu Negara yang cukup berpengaruh di dunia pada saat itu dibawah kepemimpinan Ir.

Sukarno. Untuk meresmikan dukungan terhadap RMS pihak Belanda harus berfikir ulang tentunya jika tidak ingin hubungannya dengan NKRI rusak. Hubungan tersebut diperburuk dengan sengketa wilayah Irian Barat, hubungan kurang baik tersebut akhirnya mereda pada tahun 1960an awal ditandai dengan perjanjian New York pada bulan Agustus 1960. Inti perjanjian antara Indonesia dan Belanda tersebut adalah penyerahan Irian Barat kepada pemerintah sementara PBB (UN Temporary Executive Administration, UNTEA). Mei 1963, akhirnya UNTEA menyerahkan Irian Barat sepenuhnya kepada Indonesia. Dalam selang waktu antara 1963 hingga 2005 Hubungan Indonesia tidak mengalami hambatan yang berarti atau tidak mengalami kondisi seburuk yang terjadi pada pasca kemerdekaan (1945-1960). Hubungan baik tersebut hanya mendapatkan ganjalan pada tahun 1991-1992 ketika Indonesia menolak bantuan yang diberikan Belanda sehingga Belanda merasa sakit hati, namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama.

Puncak Hubungan baik Indonesia-Belanda terjadi pada 17 Agustus 2005 ketika pada saat itu dilaksanakan HUT Proklamasi RI di Wisma Duta Besar RI di Den Haag. Ketika itu Belanda secara moral dan politik mengakui atas kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 karena sebelumnya Belanda menyebut kemerdekaan RI pada 27 Desember 1949. Pengakuan dan penandatanganan secara resmi atas kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 termasuk salah satu agenda yang akan dilaksanakan pada kunjungan 5 Oktober 2010, namun batal setelah presiden SBY membatalkan secara sepihak dan tiba-tiba.

Pembatalan tersebut dilakukan setelah pada 4 Oktober RMS mengajukan tuntutan ke Pengadilan di Den Haag yang intinya untuk menangkap dan mengadili presiden SBY atas dasar pelanggaran HAM (pada peristiwa pengibaran bendera benang raja dihadapan Presiden SBY saat dilangsungkannya pertunjukan tarian cakalele untuk memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas 29 Juni 2007) ketika Presiden SBY berkunjung ke Belanda pada 5 Oktober 2010. Hal tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan utama dibatalkannya kunjungan presiden SBY ke Belanda yang telah diagendakan sejak tahun 2007. Presiden SBY menilai jika kunjungan tetap dilaksanakan dan tuntutan RMS yang diajukan oleh pemimpin sekaligus orang yang dianggap sebagai presiden RMS, John Wattilete tetap diproses, kasus tersebut dapat menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata Internasional. Pertimbangan yang lain adalah jika RMS dapat melancarkan aksinya, maka dunia Internasionfal akan menyoroti RMS dan Indonesia, sesuatu yang akan membawa citra negatif untuk bangsa Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menguraikan pergerakan yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan memiliki pengaruh dalam hubungan diplomatik antara NKRI dengan Belanda, khususnya dalam kasus yang paling hangat yaitu pembatalan kunjungan Presiden SBY atas undangan Ratu Beatrix pada 5 Oktober 2010. Dimana rencana kunjungan tersebut telah direncanakan sejak tahun 2007, namun kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Indonesia karena tuntutan untuk menangkap dan mengadili presiden SBY ketika

berkunjung ke Belanda dikabulkan dan diproses oleh pengadilan di Den Haag, Belanda.

B. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji pokok permasalahan dengan teori yang relevan serta membuktikan hipotesa dengan data dan bukti-bukti yang ada.
- b. Menganalisis tentang system hukum didalam negeri Belanda sehingga mengesahkan tuntutan RMS terhadap presiden SBY.
- c. Mengetahui sebab dan akibat dari pasang surut hubungan antara Indonesia dengan Belanda semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- d. Sebagai aplikasi atas ilmu dari mata kuliah yang penulis dapat dari bangku perkuliahan, diantaranya :
 - i. Diplomasi, mengenai langkah pemerintah NKRI membatalkan kunjungan kenegaraan dan cara RMS mencari serta mendapatkan simpati internasional.
 - ii. Politik internasional, mengenai hubungan antarnegara/interaksi internasional.
 - iii. Hukum Internasional, mengenai status hukum perwakilan Negara baik yang menetap untuk tugas Negara maupun yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan resmi.

C. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan teman-teman mahasiswa ataupun khalayak umum menganalisis sebuah fenomena tentunya yang berhubungan dengan bidang kajian politik luar negeri.
- b. Manfaat praktis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan bagi sebuah pemerintahan ataupun politisi atau pihak-pihak berwenang dalam menyelesaikan konflik-konflik internal dalam sebuah negara sehingga tidak mempengaruhi hubungan bilateral dengan negara lain.
- c. Manfaat pengalaman, yaitu agar kejadian serupa yang mungkin muncul dan mengakibatkan akibat yang merugikan ataupun sangat merugikan agar tidak diulang dikemudian hari.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan Latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam karya tulis ini adalah :

“Bagaimana peran RMS yang ada di Belanda dalam kasus pembatalan kunjungan presiden SBY ke Belanda pada 5 Oktober 2010?”

E. Kerangka Teori

Kasus “RMS Dalam Hubungan Diplomatik NKRI-Belanda (Studi Kasus: Pembatalan Kunjungan Presiden SBY ke Belanda 5 Oktober 2010)” ini sebenarnya dapat ditelaah dengan banyak teori ataupun konsep yang telah ada. Namun untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada, untuk lebih menekankan pada peran RMS yang ada di Belanda dalam kasus pembatalan kunjungan presiden SBY ke Belanda pada 5 Oktober 2010. Penulis akan menggunakan dua teori yaitu teori peran dari Kozier Barbara serta teori Kelompok Kepentingan.

a. Teori Peran

Teori peran menyatakan bahwa :

“Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan social baik dari dalam maupun luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi social tertentu (Kozier Barbara)”¹

Setiap orang, organisasi maupun komunitas mempunyai status social tertentu didalam suatu system, dengan status social yang disandangnya, baik orang, organisasi, maupun komunitas tersebut tentunya memiliki keinginan yang ingin diwujudkan. Karena ketika mereka bertingkah laku,

¹ Zuliyanto. Praktik dan Pengaruh Kepemimpinan Kyai dan Jawara Pada Pilkada Kota Serang Tahun 2008. Program Pascasarjana UI. 2009.

tentunya didasari oleh keinginan untuk mewujudkan apa yang diinginkan agar tercapai hal yang menjadi tujuan utamanya apalagi jika seseorang, organisasi, maupun komunitas tersebut dipandang memiliki status yang tinggi, tingginya kuantitas dan kualitas tujuan yang dimilikipun mengikuti dibelakangnya. Dengan atau tanpa disadari, tingkah laku yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan tersebut mempengaruhi tingkah laku pihak lain yang memiliki hubungan baik langsung ataupun tidak langsung. Ketika secara sadar sebuah tindakan dilakukan tentunya mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pihak lain salah satunya, disitulah letak peran itu ada. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk mencapai tujuan tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh yang ada disekitarnya, bisa berbentuk pengaruh dari luar dan dari dalam tubuh pihak tersebut. Pengaruh dari luar seperti keberhasilan suatu pihak yang memiliki tujuan yang sama dengan apa yang diinginkan, sementara pengaruh dari dalam bisa berbentuk pengalaman yang telah terjadi sebelumnya ketika memperjuangkan tujuannya.

Dengan kedudukannya yang sudah merupakan warga Negara resmi belanda karena telah mendiami Negara belanda sejak diungsikan pada 1950an. Maka status social RMS di Belanda merupakan warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara asli Belanda lainnya. Para anggota RMS juga memiliki kedudukan didepan

hukum sama dengan warga Negara lain dimata hukum negeri Belanda. Dalam hal ini, RMS yang merupakan sebuah Organisasi terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas, dapat memberikan pengaruh terhadap banyak hal yang ada disekitar RMS ketika RMS melakukan tindakan, baik itu bersifat mentaati hukum maupun melanggar hukum di Negeri Belanda. Termasuk Indonesia, pihak yang terpengaruh oleh apa yang dilakukan RMS di Belanda, apalagi jika berkaitan dengan tuntutan kemerdekaan RMS terhadap Belanda. Adalah beban sejarah yang menyebabkan RMS tidak pernah lepas dari Indonesia, meskipun tidak berada di Indonesia, namun RMS adalah Organisasi yang menuntut kemerdekaan wilayahnya yang ada di Indonesia kepada Kerajaan Belanda yang sempat menjanjikan kemerdekaan kepada RMS, karena itulah tujuan utama dari RMS. Tujuan tersebut adalah tujuan paling utama dari RMS dari semenjak mereka diasingkan ke Belanda.

Dengan peran dan posisi sebagai organisasi resmi di Belanda dan termasuk sebagai warga Negara Belanda yang memiliki kedudukan hukum yang sama dengan warga Belanda yang lain. RMS melakukan tuntutan hukum untuk merubah sistem imunitas hukum yang ada di Belanda. Imunitas yang dituntut oleh RMS adalah imunitas hukum terhadap perwakilan Negara yang menetap ataupun yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan resmi ke Belanda, yang tujuan

utamanya sudah bisa ditebak, yaitu untuk menahan presiden SBY ketika presiden SBY berkunjung ke Belanda 5 Oktober 2010.

b. Teori Kelompok Kepentingan

Pengertian Interest Group atau Kelompok Kepentingan adalah :

”Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kecuali dalam keadaan luar biasa, kelompok kepentingan tidak berusaha menguasai pengelolaan pemerintah secara langsung. Sekalipun mungkin pemimpin-pemimpin atau anggotanya memenangkan kedudukan-kedudukan politik berdasarkan pemilihan umum, kelompok kepentingan itu sendiri tidak dipandang sebagai organisasi yang menguasai pemerintahan.”²

Bentuk artikulasi kepentingan yang paling umum di semua system politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan atau dalam masyarakat tradisional kepada kepala desa atau ketua suku. Setiap individu maupun masyarakat memiliki kepentingan yang harus diraih dan dipertahankan bagi kelangsungan kehidupannya, baik dalam keluarga, masyarakat, Negara maupun dengan Negara lain.

Dalam rangka meraih dan mempertahankan kepentingan ini memerlukan kerja keras, perjuangan yang semuanya bersentuhan dengan

² Rachman, A. Modul Sistem Politik Indonesia. Mercubuana. 2005.

individu atau masyarakat, maupun yang lebih luas yaitu Negara dan pihak internasional. Untuk itu semua, memerlukan kekuatan dan dukungan dari semua pihak. Sehingga memperoleh tanggapan yang serius dari masyarakat atau pihak tertentu yang menjadi tujuan dari kepentingan. Bentuk kekuatan yang memiliki daya dukung adalah kekuatan yang didalamnya berisi dua atau lebih orang yang bekerjasama, untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kekuatan itu juga dengan organisasi. Organisasi yang berdiri dan mengatasnamakan dirinya sebagai organisasi kepentingan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi social lainnya. Hal lain yang melatarbelakangi lahirnya kelompok kepentingan ini adalah adanya dominasi individu, masyarakat, Negara, dan Negara lain yang memiliki kekuatan yang besar terhadap individu, masyarakat, Negara dan Negara lain yang lemah sehingga dapat membahayakan kelangsungan kehidupannya dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bila artikulasi kepentingan dikaitkan dengan permohonan kepada pihak pemerintahan, permohonan yang cenderung “memaksa” terjadi pada kasus Republik Maluku Selatan dan Indonesia, dimana pihak RMS yang merasa memiliki hak untuk merdeka. Kemerdekaan yang menurut pihak RMS direnggut oleh Indonesia karena RMS merasa telah memenuhi syarat sebagai sebuah Negara yang sah. RMS telah merasa sebagai sebuah Negara merdeka yang mengalami tekanan sehingga dipaksa untuk

mengalah kepada pihak Negara Kesatuan Republik Indonesia menyerahkan Maluku kepada pihak Indonesia. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pihak RMS untuk mendapatkan kembali Maluku yang disabut-sebut oleh pihak RMS sebagai “tanah air”. Berbagai peristiwa dan kejadian telah tercatat dalam sejarah. Berawal dari “terusirnya” para aktivis RMS beserta keluarganya dari tanah Maluku dikarenakan pada saat itu pemerintah Indonesia dengan gencar melakukan pemberantasan terhadap gerakan separatis, sementara dengan bantuan Belanda dan janji untuk dimerdekakan oleh pihak istana Belanda, para aktivis dan keluarga dari RMS itu pun diungsikan ke Belanda.

Ketika memasuki pertengahan dekade 1960-an, hingga akhir tahun 1978, usaha untuk mendapatkan kembali “kemerdekaan” RMS yang dijanjikan oleh pihak kerajaan Belanda dilakukan melalui jalan kekerasan dan bahkan percobaan kudeta untuk menculik Ratu Juliana, ratu Belanda saat itu. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan tujuan utama yaitu “kemerdekaan” membuat RMS tidak pernah kehabisan ide dan strategi untuk meluluskan tujuan utamanya. Setelah gagal dengan cara kekerasan pada era 1970-an, RMS menyadari bahwa jalan kekerasan dan ancaman secara frontal tidak akan berguna. Selain RMS tidak memiliki armada bersenjata yang banyak ataupun kuat, RMS juga berada di tanah yang jauh dengan “tanah air” mereka sehingga untuk mendapatkan simpati kecil kemungkinannya. Hampir 40 tahun berlalu, dan ternyata semangat

mempertahankan tujuan utama dari RMS tidak luntur sedikitpun. 5 Oktober 2010, dengan cara yang berbeda dan jauh dari kekerasan, pembuktian bahwa semangat RMS belum pudar dibuktikan dengan diajukannya tuntutan kepada presiden Indonesia melalui pengadilan di Den Haag agar presiden Indonesia diadili atas tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di Ambon 29 Juni 2007. Tindakan yang mengagetkan dan diluar perkiraan semua pihak, baik pihak Indonesia yang berniat berkunjung dikarenakan mendapatkan undangan langsung dari Ratu Beatrix, ataupun pihak Belanda sebagai tuan rumah dan pihak pengundang. Kejadian ini memang disengaja dan untuk membuktikan bahwa RMS merupakan sebuah organisasi yang masih memiliki eksistensi dan kepentingan diantara hubungan Indonesia dan Belanda. Keinginan RMS di Belanda untuk benar-benar “memerdekakan tanah air” Maluku yang ada di Indonesia masih membara. Hal ini dibuktikan dengan adanya tuntutan untuk presiden SBY yang merupakan kepentingan untuk menggagalkan kunjungan presiden SBY ke Belanda dan sembari mencuri simpati internasional oleh RMS dalam kasus yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2010 itu.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dengan permasalahan yang muncul diatas, serta kerangka teori yang cukup kuat untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada kasus ini. Penulis menemukan hipotesa sementara, yaitu :

“Peran RMS yang berada di Belanda adalah mempengaruhi sistem hukum yang ada di Belanda dalam bentuk tuntutan ke pengadilan di Den Haag agar dapat mengadili Presiden SBY yang akan melakukan kunjungan ke Belanda pada 5 Oktober 2010 sehingga kunjungan presiden SBY dibatalkan.”

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam masalah ini difokuskan pada sejarah pasang surut hubungan NKRI-Belanda yang disebabkan oleh RMS, sistem hukum di Belanda dan dikhususkan dalam kasus tuntutan RMS terhadap presiden SBY hingga pidato pembatalan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda pada 5 Oktober 2010 dengan fakta dan data yang ada.

H. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus dimana studi kasus merupakan salah satu metode penelitian ilmu-ilmu social untuk penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau

situasi social.³ Studi kasus, secara umum adalah strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “how” atau “why”, bila penelitiannya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana focus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

Penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu :

1. Studi kasus eksplanatoris.
2. Studi kasus eksploratoris.
3. Studi kasus deskriptif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Jenis penelitian yang bertipe Studi kasus deskriptif di mana penulis hanya memaparkan situasi atau peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan.⁴ Penulis akan menguji teori propaganda dan teori diplomasi dengan kasus pembatalan kunjungan kenegaraan presiden NKRI Susilo Bambang Yudhoyono ke Belanda pada 5 Oktober 2010. Bersama dengan ini penulis tidak menyertakan data dengan angka namun hanya menyajikan fakta dan data dari peristiwa yang telah dibukukan dan pendapat para ahli dari peristiwa yang terjadi.

³ Deddy Mulyana. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2001. Hal 201.

⁴ Jalaludin Rahmat. Metode Penelitian Komunikasi. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2002. hal 24.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Pengumpulan data-data dan menggali serta mencatat dokumen-dokumen dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.

2. Studi Kepustakaan

Ditujukan untuk memanfaatkan data sekunder dengan memperoleh data, baik dari buku-buku, kliping atau makalah, *website-website* di internet, majalah, televisi, dan media massa yang lain.

c. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu berupa uraian atau penjelasan dimana dalam uraian tersebut tidak diperlukan data yang berwujud angka. Analisis kualitatif ini dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan dan hasil dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat Variable yaitu tuntutan RMS terhadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menyebabkan batalnya kunjungan kenegaraan ke Belanda. Variable ini nantinya menjadi kunci dari setiap data-data yang akan ditelaah untuk dimasukkan ke dalam karya tulis ini.

Dalam analisis ini data diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif, dengan mengambil kesimpulan atas fenomena kebenaran pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang ada, dan

kemudian mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan terkait dalam hubungannya dengan penelitian ini, yaitu tuntutan RMS terhadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menyebabkan batalnya kunjungan kenegaraan ke belanda.

Analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk mencari gambaran mengenai tuntutan RMS terhadap presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian menyebabkan batalnya kunjungan kenegaraan ke belanda.

Dari pengumpulan data, penulis mulai mencari makna dari data-data yang terkumpul. Selanjutnya penulis mencari arti penjelasannya yang kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu yang ada untuk ditafsirkan dan dipahami ke dalam satu kesatuan, kemudian dikategorikan sesuai dengan rincian masalahnya. Data yang ada tersebut dihubungkan, kemudian dibandingkan antara satu dengan yanglainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari sikap permasalahan yang ada.

Penyajian data yang sederhana dan mudah dipahami pula adalah cara utama untuk menganalisis data deskriptif kualitatif yang valid. Penyajian ini bisa

dengan matriks, grafik atau bagan yang dirancang untuk menggabungkan informasi⁵.

Hal-hal penting yang akan diamati dalam penelitian ini adalah sejarah RMS dalam hubungan NKRI-belanda, sistem hukum di Belanda, politik dalam dan luar negeri Indonesia, politik dalam negeri belanda khususnya kebijakan terhadap warga negaranya, serta ciri khas politik pencitraan ala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas serta terperinci mengenai penyusunan skripsi ini, berikut akan penulis uraikan sistematika penulisan. Dimana sistematika tersebut akan penulis bagi menjadi lima bab yang masing-masing berisi hal-hal sebagai berikut :

a. BAB I

Dalam bab pertama ini akan memuat pendahuluan dengan sub pembahasan terdiri dari : Latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁵ Ashadi siregar. Metode Penelitian kualitatif. LP3Y. Yogyakarta.1987. Hal 40.

b. BAB II

RMS dalam hubungan antara NKRI dengan Belanda

Pada bab ini dijelaskan catatan peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi seperti Persepsi Kemerdekaan RI dan NKRI di Mata RMS dan peran Belanda untuk RMS, Dinamika RMS dari Tahun 1950 Hingga 2010 dan Peristiwa Tarian Cakalele 29 Juni 2007.

c. BAB III

Sistem Politik Negara Belanda dan Sistem Hukum Dalam Negeri Belanda

Pada bab ini dijelaskan Sistem Politik Negara Belanda, Sistem Hukum di Belanda, Kelompok Kepentingan di Belanda.

d. BAB IV

Peran RMS di Belanda dalam pembatalan kunjungan SBY ke Belanda

Pada bab ini menjelaskan tentang Kronologis Peristiwa yang terjadi 2 minggu sebelum pembatalan, Tokoh dibalik tuntutan RMS terhadap SBY, Syarat Mengajukan Tuntutan di *Kort Geding* (Pengadilan yang dipercepat) yang dapat dipenuhi RMS, Tuntutan *Kort Geding* (pengadilan yang dipercepat) RMS yang diterima di Pengadilan Den Haag, Tuntutan RMS di Den Haag Penyebab Pembatalan kunjungan Presiden SBY.

e. BAB V

Kesimpulan